

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Saat ini demokrasi menjadi suatu wacana yang sangat menarik untuk diperbincangkan dan menjadi suatu isu utama dalam tataran sosial politik dunia, karena demokrasi dianggap sebagai suatu sistem yang mengedepankan hak asasi manusia dan menjunjung nilai-nilai humanisme, demokrasi yang sejak tahun 90-an berkembang pesat masih terasa sampai abad 21 ini, gelombang demokratisasi melanda hampir seluruh belahan benua di dunia, tidak terkecuali dunia Arab, khususnya Lebanon.

Di Lebanon, Gelombang transisi demokratisasi ditandai dengan dilakukannya penarikan mundur seluruh pasukan Suriah pada tanggal 26 April 2005, proses penarikan mundur tentara Suriah membuat Lebanon segera memasuki era baru. Lebanon sudah dapat menentukan sendiri arah kebijakan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial keamanan. Citra Lebanon sebagai negara berdaulat kini pulih kembali.

Selama kehadiran 29 tahun pasukan militer dan dinas intelijen Suriah, ruang gerak pemerintah dan rakyat Lebanon praktis tidak leluasa. Pengaruh Suriah sangat kuat dalam menentukan setiap arah kebijakan publik, wibawa Lebanon sebagai negara merdeka dan berdaulat menjadi pudar di bawah bayangan kuat kehadiran

pasukan militer dan dinas intelijen Suriah. Pengaruh Suriah terasa dominan di berbagai sektor kehidupan Lebanon.

Kepergian pasukan Suriah menimbulkan kegembiraan di kalangan mayoritas rakyat Lebanon. Pada tanggal 1 Mei 2005, seluruh rakyat Lebanon melakukan aksi *long march* (turun kejalan) menyambut kebahagiaan atas penarikan mundur pasukan Suriah. Dan pada tanggal 29 Mei 2005, untuk pertama kalinya selama 33 tahun Lebanon melakukan pemilu tanpa tekanan intervensi dari bangsa lain terutama Suriah., masyarakat Lebanon sangat antusias dalam menyambut pemilu tersebut.

Dengan kembalinya kedaulatan penuh Republik Lebanon dari tangan Suriah mungkinkah akan membawa Lebanon menjadi Negara yang lebih demokratis atau pemilu kali ini sama saja dengan pemilu-pemilu sebelumnya, dan proses demokrasi yang terjadi di Lebanon hanya sekedar prosedur formal ?, Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat "**Transisi Demokrasi Lebanon paska Penarikan Mundur Tentara Suriah**" sebagai judul skripsi.

B. Tujuan Penelitian.

Tujuan penulisan dalam menulis skripsi ini antara lain:

1. Sebagai wahana penulis mengasah kemampuan menganalisa persoalan politik
2. Untuk memperdalam pengetahuan penulis pada proses demokrasi yang terjadi di Lebanon.
3. Mengaplikasikan teori yang dipelajari di bangku kuliah

4. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata I (SI) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah.

Lebanon memperoleh kemerdekaan dari Perancis pada bulan November 1943 dengan status sebagai negara yang berdaulat penuh yang terlepas dari Suriah. Setelah merdeka, Lebanon menerapkan sebagian bentuk *consociational democracy* antara tahun 1943-1975, yang secara formal Lebanon mengakui keberadaan 17 sekte. Suasana perpolitikan di negara Lebanon mengalami pasang surut, khususnya untuk sebuah negara yang sedang berkembang. Kekacauan politik yang terjadi pada tahun 1976 menyebabkan pecahnya perang saudara di Lebanon dan masuknya intervensi asing, khususnya negara Suriah.

Pasukan Suriah pertama-tama datang ke Lebanon pada tahun 1976 atas Mandat Liga Arab untuk membantu mengatasi perang saudara di Lebanon. Kedatangannya semula mendapat sambutan hangat karena diharapkan akan mampu memadamkan perang saudara Lebanon yang pecah pada tahun 1975. Kehadiran pasukan perdamaian Suriah dalam perang saudara Lebanon yang dilancarkan sejak Januari 1976 pada hakekatnya dimaksudkan untuk mempertahankan persatuan Lebanon dan mencegah terjadinya partisi atas negara tetangganya itu.

Meskipun sudah tercapai kesepakatan perdamaian di Lebanon pada tahun 1990, pasukan perdamaian Suriah tetap menjaga eksistensinya di Negara Lebanon.

Keberadaan mereka bukannya bisa menunjang kelangsungan kesepakatan perdamaian di Lebanon malah membuat perang saudara itu menjadi berlarut-larut. Bahkan kehadiran pasukan Suriah menimbulkan persoalan tersendiri dan tidak kecil bagi Lebanon. Apalagi kehadiran pasukan Suriah justru ikut memperkeruh keadaan karena sering gagal mempertahankan netralitasnya. Karena secara tidak langsung Suriah telah membagi 2 kubu oposisi, antara pro dan kontra Suriah, sehingga membuat situasi politik Lebanon semakin tegang.

Pada tanggal 14 Februari 2005, secara mengejutkan terjadi aksi pemboman yang menewaskan mantan perdana menteri Lebanon Rafik al-Hariri yang merupakan salah satu tokoh oposisi penentang kehadiran pasukan Suriah. Ia meletakkan jabatannya karena berseberangan sikap dengan Presiden Emile Lahoud dukungan Suriah. Hariri menghendaki agar tentara Suriah (16.000 orang) segera ditarik dan tidak mencampuri urusan dalam negeri Lebanon yang akan mengadakan pemilu parlemen pada bulan Mei 2005 yang lalu. Suara Hariri sejalan dengan suara kelompok oposisi. Kematian Hariri meningkatkan sentimen anti Suriah hingga ketegangan politik di Lebanon menjadi bertambah. Sebelumnya Presiden terpilih Bashir Gemayel tewas dalam serangan bom di markas Phalangis, 14 September 1982. Ia tewas hanya delapan hari sebelum dilantik menjadi presiden. Dan pada tanggal 1 Juni 1987, Perdana Menteri Rashid Karami, seorang Sunni, juga tewas karena ledakan bom.¹

Rentetan tewasnya elit politik di Lebanon dan tewasnya mantan perdana menteri Rafik al-Hariri menjadi penarik pelatuk tuntutan akan kebebasan. Rakyat dari

berbagai ragam latar belakang menuntut kebebasan dengan ditandai angkat kakinya Suriah dari Lebanon. Mereka ingin bebas. Bebas dari tangan Suriah yang berkuasa selama tiga dasawarsa. Dan pada tanggal 14 Maret 2005, sekitar 800 ribu pendukung oposisi berdemonstrasi di Alun-alun kota Beirut.² Aksi untuk mengenang satu bulan kematian mantan Perdana menteri Rafik al-Hariri tercatat sebagai unjuk rasa terbesar di Negara Lebanon. Masa yang mengibarkan bendera nasional juga meneriakkan slogan kebebasan, kedaulatan, dan kemerdekaan. Tepat pukul 12.55 waktu setempat, pengunjung rasa mengheningkan cipta sejenak untuk mendiang Hariri yang tewas pada tanggal 14 Februari yang lalu.³ Massa juga mengecam kebijakan Presiden Lahoud yang mengangkat kembali Omar Karami yang pro Suriah sebagai Perdana Menteri Lebanon. Karami mengundurkan diri pada tanggal 28 Februari 2005 setelah unjuk rasa besar-besaran yang digalang kelompok oposisi.

Setelah mendapat kecaman dari berbagai pihak akhirnya, pada tanggal 26 April 2005, secara keseluruhan dilakukan penarikan mundur pasukan Suriah yang berada di Lebanon. Hal ini di sambut baik oleh rakyat Suriah dan para oposisi anti Suriah dan pada tanggal 1 Mei 2005 seluruh rakyat Lebanon melakukan aksi *long march* (turun kejalan) menyambut kebahagiaan atas penarikan seluruh pasukan Suriah.

Penarikan seluruh pasukan Suriah dari Lebanon pada tanggal 26 April 2005 yang lalu, membuat Lebanon segera memasuki era baru. Lebanon sudah dapat

¹ <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0502/21/ln/1568231.htm>, diakses 1 Oktober 2005

² www.kompas.com/kompas-cetak/0502/21/ln/1568231.htm, diakses 9 Oktober 2005

menentukan sendiri arah kebijakan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial keamanan. Citra Lebanon sebagai negara berdaulat pulih kembali. Perubahan yang terjadi pada negara ini merupakan proses transisi menuju sebuah negara demokratis, menurut Fred Halliday, dan aktivis politik asal Mesir, Saaduddin Ibrahim, Demokrasi kelihatannya mulai menggelinding di Timur Tengah, "pembukaan demokrasi" dengan munculnya *people power* di Lebanon yang menuntut penarikan mundur tentara Suriah di Lebanon merupakan salah satu bukti rakyat Lebanon telah bosan dengan otoritarianisme intervensi asing. Mereka menginginkan ruang untuk bernapas mengungkapkan berbagai aspirasi, dalam berbagai unjuk rasa para demonstran meneriakkan "*kifayah*", cukuplah sudah, atau *erough is enough*, "Kami ingin menentukan nasib sendiri."⁴

Dan pada tanggal 29 Mei 2005 untuk pertama kalinya selama 33 tahun, Lebanon melaksanakan pemilu legislatif tanpa adanya campur tangan Suriah. Proses pemilu Legislatif Lebanon, dilakukan dalam empat tahapan yang berurutan di empat daerah yang berbeda. Untuk tahap pertama pemilu diadakan di Beirut ibu kota Lebanon pada tanggal 29 Mei 2005, dan secara berurutan. Pada tahap kedua diadakan di Lebanon Selatan pada tanggal 5 Juni 2005, pada tahap ketiga di *Central Mount Lebanon* dan Lembah Bekaa pada tanggal 12 Juni, serta di Lebanon utara pada tanggal 19 Juni 2005. Pada pemilu tahap pertama, sebanyak 780 tempat pemungutan suara telah dibuka di Beirut sejak pukul 07.00 guna memberi kesempatan sekitar

³<http://www.suaramerdeka.com/harian/0504/28/int3.htm>, diakses 12 Oktober 2005

420.630 orang untuk memberikan suaranya pada Pemilu tahap pertama dari empat tahap yang diadakan di Beirut.

Hasil pemilu Legislatif menyimpulkan bahwasannya kursi parlemen di dominasi oleh aliansi Rafik Hariri yang merupakan golongan anti Suriah sebesar 72 kursi, sedangkan pada urutan kedua dimenangkan oleh kelompok Resistance and Development Bloc sebanyak 35 kursi dan pada urutan ketiga diduduki oleh kelompok aliansi Aoun yang juga merupakan kelompok pro Suriah sebanyak 21 kursi. Pemilu tahap pertama ini untuk pertama kalinya diawasi oleh 100 orang peninjau dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa

D. Pokok Permasalahan.

Dari latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut : Mengapa paska penarikan mundur pasukan Suriah pada tahun 2005, perkembangan demokrasi di Lebanon mengalami berbagai hambatan ?

E. Kerangka Teori

Dalam membahas suatu permasalahan, diperlukan suatu pendekatan atau landasan teori untuk mempermudah menjawab permasalahan tersebut. Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa konsep dan teori demokrasi antara lain.

⁴ http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=192008&kat_id=19&kat_id1=&kat_id2, diakses 21 Oktober 2005.

1. Teori Demokrasi

Samuel P. Huntington menyebutkan adanya beberapa faktor yang menghambat demokrasi terwujud di beberapa negara. Yang pertama adalah politik, yakni tidak adanya pengalaman dengan demokrasi pada kebanyakan negara yang masih otoriter ditahun 1990-an dan pemimpin yang menciptakan rezim otoriter atau yang tetap berkuasa untuk waktu yang lama dalam rezim otoriter atau yang tetap berkuasa untuk waktu lama dalam rezim-rezim yang semacam itu, biasanya menjadi kaum konservatif yang gigih menentang demokratisasi. Kedua adalah faktor budaya, tradisi-tradisi budaya yang sangat bervariasi dan tidak demokratis tentunya akan menghambat penyebaran-penyebaran demokrasi dalam masyarakat yang tentunya tidak akan memberikan legitimasi yang kuat pada lembaga-lembaga demokrasi tersebut secara efektif. Ketiga adalah faktor ekonomi, kemiskinan merupakan suatu penghalang utama demokrasi disuatu negara. Karena bergantung pada perkembangan ekonomi disuatu negara.⁵

Dilihat dari faktor-faktor diatas, maka terlihat bagaimana terhambatnya proses demokrasi di Lebanon. Dalam bidang politik, masih berlakunya perjanjian Taif di Lebanon paska penarikan mundur tentara Suriah tentunya menimbulkan pengesahan semu dan adanya tuntutan dalam persamaan hak dalam berpartisipasi politik dalam memperoleh kursi jabatan struktur politik tentunya menimbulkan dampak krisis Ekualitas. Dalam Budaya masyarakat Lebanon yang majemuk menurut sekte, hal

⁵ Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Grafiti, Jakarta, 1995, hal.147.

menyebabkan munculnya dampak krisis kontinuitas yaitu adanya konflik yang berkepanjangan. Dan dalam bidang ekonomi, adanya krisis kesenjangan ekonomi antar sekte dan pembangunan yang tidak merata.

Selanjutnya Jorgen Habermas menjelaskan tentang kecenderungan-kecenderungan terjadinya krisis legitimasi dan indikatornya antara lain :

1. Krisis Ekonomi

Sistem ekonomi memerlukan masukan (*Input*) dalam bentuk kerja dan modal, sedang keluaran (*output*)-nya adalah nilai-nilai yang bisa dikonsumsi yang didistribusikan diantara lapisan-lapisan sosial. Kecenderungan krisis ekonomi ini juga merupakan krisis sosial, sebab akan menyingkap antagonisme kelas antara para pemilik modal dan massa yang hidup dari upah. Krisis ini dapat tampil dalam bentuk krisis keuangan negara, inflasi tetap, kesenjangan sosial, dan sebagainya.

2. Krisis Politik

Sistem politik memerlukan masukan loyalitas massa, sedang keluarannya adalah keputusan-keputusan administratif yang dilaksanakan secara berdaulat. Krisis masukannya dalam bentuk krisis legitimasi, yaitu sistem legitimasi tak berhasil mempertahankan loyalitas massa. Karenanya, tatanan-tatanan politik di beberapa negara rata-rata menyebut diri mereka demokratis, walaupun pada kenyataannya tidak demikian. Negara-negara tersebut seringkali melanggar kebebasan-kebebasan sipil, menunjukkan ikatan-ikatan sipil yang lemah, menunjukkan monopoli kekuasaan, serta kesenjangan yang ekstrim antara golongan kaya dan miskin

disamping itu, terjadinya krisis politik di suatu negara juga ditandai dengan adanya penindasan politik dan perlawanan terhadap rezim yang berkuasa.⁶

Dalam konteks Lebanon, krisis legitimasi terjadi akibat munculnya kedua krisis yang dijadikan indikator tersebut. Pada indikator pertama yakni krisis ekonomi, Lebanon mengalami krisis ekonomi yang berupa kesenjangan sosial. Di Lebanon, kurang dari separuh penduduk (49,25%) tinggal di pedesaan, sedangkan selebihnya (50,75%) tinggal di kota. Penduduk pedesaan, 70% tinggal di Bekka dan di Lebanon Selatan, yang merupakan tempat tinggal kaum Muslim Sunni, 55% penduduk tinggal di desa. Keadaan ini tidak berubah secara menyolok dari tahun ke tahun walau kemudian banyak terjadi urbanisasi. Pada umumnya, keadaan ekonomi golongan Muslim lebih rendah daripada golongan Kristen, di kota-kota besar, kaum urban ini tetap miskin dan daerah tempat tinggal mereka di Beirut dikenal sebagai *the poverty belt* yaitu daerah miskin yang melingkari kota tersebut kesenjangan ekonomi antara golongan Muslim dan Kristen ini tentu saja menjadi salah satu penghambat jalannya proses demokrasi di Lebanon. Pada indikator kedua yakni krisis politik, masih berlakunya perjanjian Taif pembagian struktur politik berdasarkan sekte pasca penarikan mundur tentara Suriah hal itu tentu saja menunjukkan ikatan-ikatan sipil yang lemah dan hal ini akan menimbulkan tingkat anarkisme yang merupakan salah satu faktor penghambat bagi terciptanya demokrasi.

⁶ *Ibid*, Jurgen Habermas, dalam F. Budi Hardiman (eds), *Menuju Masyarakat Komunikatif : ilmu Masyarakat, Politik dan Postmodernisme menurut J. Habermas*, Kanisius, Yogyakarta 1993, hal.138-141.

Sedangkan menurut Robert A. Dahl, syarat Negara dapat dikatakan sebagai demokratis adalah adanya *equalitas* atau persamaan di bidang politik dan ekonomi. Persamaan dalam bidang politik yakni kesamaan hak setiap warganegara untuk memilih dan dipilih, sedangkan dalam bidang ekonomi adalah kesamaan memiliki peluang untuk memperoleh kesejahteraan.⁷

Dalam konteks Lebanon, Masih berlakunya perjanjian Taif menyebabkan Adanya pembatasan terhadap hak untuk memilih dan dipilih sehingga negara Lebanon jauh dari kriteria negara demokrasi tidak adanya Persamaan atau egalitarianisme yang merupakan nilai dasar dari prinsip kehidupan demokrasi. Hal tersebut terlihat pada pemilu putaran pertama dimana 10 kursi yang diperebutkan dalam pemilihan Beirut telah dimenangi oleh Saad Hariri, sementara sembilan lainnya sudah terlebih dulu dimenangi oleh calon-calon dari kubu Saad Hariri sebelum pemilu karena tidak ada pesaing. Dan rakyat yang ambil bagian dalam pemilu tak seperti yang diharapkan, yaitu hanya 27 persen dari pemilik hak suara, sementara angka keikutsertaan 35 persen pada pemilu tahun 2000. Dan pada indikator yang kedua tidak adanya peluang dan kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan, dan mendapatkan pelayanan dari Negara dalam memajukan kehidupan ekonomi membuat Lebanon Jauh dari kehidupan yang demokratis.

⁷Robert A. Dahl, *Poliarchy; Participation and Opposition*, New Heaven, Yale University Press, 1971, hal.2

F. Hipotesis

Dari latar belakang masalah dan teori-teori yang telah dijelaskan maka didapat jawaban sementara atau hipotesis yaitu : Kehidupan demokrasi Lebanon paska penarikan mundur tentara Suriah pada tahun 2005 tidak mengalami perkembangan hal tersebut dikarenakan adanya faktor-faktor penghambat antara lain :

1. Adanya krisis legitimasi. Dalam bidang politik, adanya krisis Loyalitas terhadap rezim pemerintahan dan dalam bidang ekonomi, ditandai dengan adanya krisis kesenjangan ekonomi yang ekstrem antara golongan Muslim dan Kristen.
2. Adanya krisis ekuualitas. Dalam bidang politik, ditandai dengan adanya krisis memilih dan dipilih, sedangkan dalam bidang ekonomi ditandai dengan adanya pembatasan peluang dan kesempatan untuk memperoleh kesejahteraan.
3. Adanya krisis kontinuitas yang ditandai dengan adanya potensi konflik dalam pluralisme struktural cukup tinggi dan berkelanjutan.

G. Metodologi Penulisan dan Pengumpulan Data

Dalam Ilmu hubungan Internasional seringkali ditemukan kesulitan dalam teknik meneliti permasalahan internasional yang dikarenakan adanya jarak, kompleksitas masalah, dan lain-lain sehingga penulisan ini bersifat *anobservasi research* dan bersifat deskriptif

Data-data yang akan digunakan karya tulis ini diperoleh melalui studi pustaka. Studi ini diperoleh untuk mendapat landasan teori beserta data-data sekunder dengan maksud agar dapat digunakan dalam menganalisis rumusan permasalahan. Data-data

tersebut diperoleh melalui buku-buku literatur, jurnal-jurnal internet dan CD-Rom, dan tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

H. Jangkauan Penelitian

Agar pembahasan tidak meluas dan penyelesaiannya lebih kongkrit, maka penulis menggunakan batasan terhadap penelitian ini. Batasan waktu yang digunakan penulis adalah saat penarikan mundur tentara Suriah 2005, pemilu raya dan konflik Israel –Lebanon 2006.

I. Sistematika Penulisan.

Bab *pertama*, berisikan tentang latar belakang pemilihan judul dan latar belakang kejadian yang mendukung pokok permasalahan yang timbul. Dengan mempergunakan kerangka pemikiran berupa teori demokrasi maka dihasilkan hipotesa untuk menjawab sementara pokok permasalahan yang ada.

Bab *kedua*, membahas tentang gambaran umum negara Lebanon secara singkat namun padat agar mendapatkan gambaran secara komprehensif tentang Lebanon. Kondisi geografis, kondisi sosial ekonomi, pelebagaan struktur politik sampai kehidupan yang tidak demokratis di era pendudukan tentara Suriah. Sehingga dengan adanya gambaran tersebut bisa di dapatkan analisa yang lebih baik terhadap permasalahan yang ada di Lebanon.

Bab *ketiga*, membahas tentang Kronologi proses penarikan mundur tentara Suriah, sistem pemilu dan hasil pemilu Lebanon paska penarikan mundur tentara Suriah pada tanggal 29 Mei 2005.

Bab *keempat*, membahas tentang hambatan demokratisasi di Lebanon antara lain, Krisis Ekualitas, Krisis Legalitas dan Krisis Kontinuitas.

Bab *kelima*, berisikan tentang kesimpulan dari apa yang telah diuraikan oleh penulis diatas.